IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) TINGKAT PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN

Muhamad Fajar Bachrul Alam
NPP. 33.0600
Program Studi Kebijakan Publik
Email: mfbachrulalam@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Prof. Dr. Drs. Hyronimus Rowa, M.Si.
Email: hyronimus_rowa@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement (Research Gap): *Numerous studies have been conducted on the implementation of the School Operational Assistance Fund (BOS) policy, but most have focused on urban areas or regions with relatively strong institutional capacity. Meanwhile, studies on the implementation of the BOS Fund in areas with rural characteristics, resource constraints, and challenging geographical conditions—such as Lebak Regency—remain limited. Furthermore, previous research generally employed different policy implementation theories; thus, a study using the perspective of Knill and Tosun (2020) is necessary to gain a more comprehensive understanding of the factors influencing policy implementation.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze the implementation of the School Operational Assistance Fund (BOS) policy at the elementary education level in Lebak Regency, Banten Province, based on Knill and Tosun's (2020) policy implementation perspective* ***Method:*** *This study employs a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through interviews and documentation, and then analyzed based on the six dimensions of policy implementation identified by Knill and Tosun (2020).* ***Result:*** *The research findings indicate that the implementation of the BOS Fund in Lebak Regency has proceeded fairly well. The dimensions of policy instrument selection, policy design, and institutional design demonstrate relatively good outcomes. However, challenges remain in the area of administrative capacity, including limited human resources, a high administrative burden, and uneven proficiency in managing digital systems. Additionally, community participation in monitoring the use of the BOS Fund is still suboptimal.* ***Conclusion:*** *The implementation of the BOS Fund policy at the primary education level in Lebak Regency is considered fairly effective, but not yet optimal. Improving school administrative capacity, strengthening technical guidance, and increasing community participation are necessary to support more effective, transparent, and accountable management of the BOS Fund.*

Keywords: *Policy Implementation, BOS Fund, Primary Education, Knill and Tosun, Lebak Regency.*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): Penelitian mengenai implementasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah banyak dilakukan, namun sebagian besar berfokus pada daerah perkotaan atau wilayah dengan kapasitas kelembagaan yang relatif baik. Sementara itu, kajian mengenai implementasi Dana BOS pada daerah dengan karakteristik perdesaan, keterbatasan sumber daya, dan kondisi geografis yang menantang seperti Kabupaten Lebak masih terbatas. Selain itu, penelitian sebelumnya umumnya menggunakan teori implementasi kebijakan yang berbeda sehingga diperlukan kajian menggunakan perspektif Knill dan Tosun (2020) untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tingkat pendidikan dasar di Kabupaten Lebak Provinsi Banten berdasarkan perspektif implementasi kebijakan Knill dan Tosun (2020). **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis berdasarkan enam dimensi implementasi kebijakan Knill dan Tosun (2020). **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Dana BOS di Kabupaten Lebak telah berjalan cukup baik. Dimensi pilihan instrumen kebijakan, desain kebijakan, dan desain kelembagaan menunjukkan capaian yang relatif baik. Namun, masih terdapat kendala pada aspek kapasitas administrasi berupa keterbatasan sumber daya manusia, beban administrasi yang tinggi, dan kemampuan pengelolaan sistem digital yang belum merata. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan Dana BOS masih belum optimal. **Kesimpulan:** Implementasi Kebijakan Dana BOS tingkat pendidikan dasar di Kabupaten Lebak tergolong cukup efektif, namun belum optimal. Peningkatan kapasitas administrasi sekolah, penguatan pembinaan teknis, serta peningkatan partisipasi masyarakat diperlukan untuk mendukung pengelolaan Dana BOS yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Dana BOS, Pendidikan Dasar, Knill dan Tosun, Kabupaten Lebak.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan nasional karena berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks negara kesejahteraan (*welfare state*), pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh warga negara. Salah satu instrumen kebijakan yang digunakan pemerintah Indonesia untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang bertujuan membantu pendanaan operasional satuan pendidikan dasar dan menengah sehingga dapat mengurangi beban biaya pendidikan masyarakat sekaligus meningkatkan mutu layanan pendidikan (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2024).

Sejak implementasinya pada tahun 2005, Dana BOS telah menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam mendukung pemerataan pendidikan. Namun demikian, berbagai hasil evaluasi menunjukkan bahwa pengelolaan Dana BOS masih menghadapi sejumlah permasalahan, terutama dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan administratif.

Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan adanya peningkatan praktik penyimpangan pengelolaan Dana BOS selama periode 2022-2024. Persentase sekolah yang menggunakan dana tidak sesuai peruntukan meningkat dari 12,0% pada tahun 2022 menjadi 17,2% pada tahun 2024. Selain itu, praktik pungutan atau potongan Dana BOS meningkat dari 17,3% menjadi 23,4%, sedangkan manipulasi dokumen dan laporan fiktif meningkat dari 42,0% menjadi 58,9% (KPK, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan regulasi dan digitalisasi pengelolaan keuangan sekolah belum sepenuhnya mampu mengatasi persoalan implementasi kebijakan Dana BOS.

Permasalahan implementasi Dana BOS di tingkat nasional juga tercermin pada berbagai daerah, termasuk Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Kabupaten Lebak merupakan wilayah yang memiliki karakteristik geografis berupa daerah perdesaan dan pegunungan dengan tingkat kemiskinan yang relatif tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Banten. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebak, persentase penduduk miskin pada tahun 2023 mencapai 8,59% dan sekitar 45,9% penduduk usia 15 tahun ke atas hanya menamatkan pendidikan dasar (BPS Kabupaten Lebak, 2023). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peran Dana BOS sangat penting dalam mendukung keberlangsungan operasional sekolah dan meningkatkan akses pendidikan masyarakat.

Besarnya peran Dana BOS di Kabupaten Lebak tercermin dari jumlah anggaran yang diterima setiap tahun. Pada tahun 2024 Kabupaten Lebak menerima Dana BOS Reguler sebesar Rp175,15 miliar yang disalurkan kepada 1.023 Sekolah Dasar (SD) dan 490 Sekolah Menengah Pertama (SMP). Pada tahun 2025 jumlah tersebut meningkat menjadi Rp178,64 miliar dengan cakupan penerima sebanyak 1.023 SD dan 492 SMP (BKAD Kabupaten Lebak, 2024; BPS Kabupaten Lebak, 2024). Besarnya alokasi dana tersebut menuntut adanya sistem pengelolaan yang efektif, transparan, dan akuntabel agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal.

Meskipun demikian, hasil pengawasan menunjukkan bahwa pengelolaan Dana BOS di Kabupaten Lebak masih menghadapi berbagai kendala. Berdasarkan laporan Inspektorat Kabupaten Lebak, BPK Perwakilan Provinsi Banten, dan SPI Pendidikan KPK, terjadi peningkatan keterlambatan pelaporan, temuan administratif, serta potensi penyimpangan penggunaan Dana BOS selama periode 2022-2024. Persentase sekolah yang mengalami keterlambatan pelaporan meningkat dari 22,4 persen pada tahun 2022 menjadi 26,8 persen pada tahun 2024. Temuan administratif meningkat dari 27,6 persen menjadi 31,5 persen, sedangkan potensi penyimpangan Dana BOS meningkat dari 7,8 persen menjadi 9,7 persen (Inspektorat Kabupaten Lebak, 2024).

Tabel 1.1

Indikator Pengelolaan Dana BOS Kabupaten Lebak Tahun 2022–2024

No	Indikator	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)
1	Sekolah dengan keterlambatan pelaporan	22,4	25,7	26,8
2	Sekolah dengan temuan administratif	27,6	29,3	31,5
3	Sekolah dengan potensi penyimpangan/manipulasi Dana BOS	7,8	8,9	9,7

Sumber: diolah dari Inspektorat Kabupaten Lebak (2022-2024), BPK Perwakilan Provinsi Banten (2023–2024), dan SPI Pendidikan KPK (20222024).

Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah menerapkan sistem digital melalui ARKAS dan SIPLah, implementasi kebijakan Dana BOS di Kabupaten Lebak

masih menghadapi tantangan dalam aspek akuntabilitas, kepatuhan administratif, kapasitas pengelolaan keuangan sekolah, dan efektivitas pengawasan.

Permasalahan tersebut menjadi semakin penting apabila dikaitkan dengan kondisi pembangunan pendidikan Kabupaten Lebak. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, Kabupaten Lebak memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terendah di Provinsi Banten, yaitu sebesar 69,23, dengan rata-rata lama sekolah hanya 7,8 tahun dan tingkat kemiskinan sebesar 8,52 persen (BPS Provinsi Banten, 2024). Rendahnya capaian pendidikan tersebut mengindikasikan bahwa kebijakan BOS yang diharapkan mampu memperluas akses dan meningkatkan mutu pendidikan belum sepenuhnya memberikan dampak yang optimal dalam konteks daerah dengan keterbatasan sosial, ekonomi, dan geografis seperti Kabupaten Lebak.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Secara konseptual, keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, seperti desain kebijakan, instrumen kebijakan, struktur pengawasan, desain kelembagaan, kapasitas administrasi, dan penerimaan sosial (Knill & Tosun, 2020). Namun, berbagai penelitian terdahulu mengenai Dana BOS di Indonesia umumnya masih berfokus pada aspek implementasi administratif, evaluasi program, maupun efektivitas penggunaan dana.

Penelitian Widodo et al. (2020) di Kota Malang menemukan masih adanya penyimpangan penggunaan Dana BOS dan rendahnya transparansi pelaporan kepada masyarakat. Penelitian Nurhayati et al. (2023) di Kota Bandung menunjukkan bahwa kebijakan Dana BOS telah berjalan dengan baik, namun masih menghadapi kendala pada distribusi dana dan peningkatan kualitas pengelolaan. Sementara itu, penelitian Arif et al. (2024) di Jakarta Barat menyimpulkan bahwa implementasi Dana BOS telah berjalan efektif dan memberikan dampak positif terhadap mutu pendidikan. Penelitian Simanjuntak et al. (2025) menunjukkan bahwa efektivitas Dana BOS masih dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas manajerial, lemahnya pemahaman terhadap petunjuk teknis, dan rendahnya partisipasi komite sekolah. Adapun penelitian Sa'adah (2025) menemukan bahwa komunikasi antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan Dana BOS belum berjalan optimal karena minimnya keterlibatan wali murid dan komite sekolah.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, terdapat dua kesenjangan penelitian (*research gap*). Pertama, sebagian besar penelitian dilakukan pada daerah yang memiliki kapasitas fiskal, sumber daya manusia, dan kelembagaan yang relatif lebih baik, seperti Bandung, Jakarta Barat, Malang, dan Gresik. Sementara itu, penelitian mengenai implementasi Dana BOS pada daerah dengan karakteristik rural, tingkat kemiskinan tinggi, dan kapasitas kelembagaan yang terbatas seperti Kabupaten Lebak masih sangat terbatas.

Kedua, dari aspek teoritis, penelitian terdahulu umumnya menggunakan pendekatan implementasi kebijakan Grindle, evaluasi Dunn, model CIPP, atau analisis Miles dan Huberman. Hingga saat ini belum ditemukan penelitian yang secara khusus menganalisis implementasi kebijakan Dana BOS di Kabupaten Lebak menggunakan perspektif implementasi kebijakan Knill & Tosun (2020), yang mencakup enam dimensi utama yaitu *policy instrument choice, policy design, control structure, institutional design, administrative capacity,* dan *social acceptance*. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual sekaligus memperkaya kajian implementasi kebijakan pendidikan dalam konteks daerah yang memiliki keterbatasan kelembagaan dan karakteristik wilayah perdesaan.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian mengenai implementasi kebijakan Dana BOS di Kabupaten Lebak memiliki urgensi yang tinggi baik secara empiris maupun akademis. Secara empiris, peningkatan temuan administratif, keterlambatan pelaporan, dan potensi penyimpangan Dana BOS menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan dalam tata kelola kebijakan pendidikan di tingkat daerah. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi efektivitas pemanfaatan Dana BOS dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan dan pemerataan akses pendidikan.

Selain itu, Kabupaten Lebak merupakan daerah dengan capaian pembangunan pendidikan yang relatif tertinggal dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Banten. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia, rata-rata lama sekolah, dan tingginya tingkat kemiskinan menunjukkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan pendidikan, khususnya Dana BOS, menjadi faktor penting dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia daerah (BPS Provinsi Banten, 2024).

Secara akademis, penelitian ini penting karena dapat mengisi kekosongan kajian mengenai implementasi Dana BOS pada daerah rural dengan kapasitas kelembagaan yang terbatas. Penggunaan teori implementasi kebijakan Knill dan Tosun (2020) juga memberikan perspektif yang lebih komprehensif dibandingkan penelitian terdahulu karena mampu menganalisis keterkaitan antara desain kebijakan, kapasitas kelembagaan, sistem pengawasan, dan penerimaan sosial dalam proses implementasi kebijakan.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu administrasi publik dan kebijakan pendidikan, tetapi juga menghasilkan rekomendasi yang dapat digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak dan pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah sehingga tujuan pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan dapat tercapai secara optimal.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan bagian penting dalam suatu penelitian karena berfungsi sebagai landasan untuk memahami perkembangan kajian yang telah dilakukan sebelumnya, mengidentifikasi kesenjangan penelitian (*research gap*), serta menentukan posisi penelitian yang akan dilaksanakan. Berbagai penelitian mengenai kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah dilakukan dengan fokus, pendekatan, dan lokus penelitian yang beragam.

Penelitian yang dilakukan oleh Widodo, Purnamasari, Hidayah, dan Hasanah (2020) dengan judul *Implementasi Kebijakan Dana BOS di Kota Malang* menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan teori implementasi kebijakan Grindle. Hasil penelitian menunjukkan masih ditemukannya berbagai penyimpangan dalam penggunaan Dana BOS, rendahnya transparansi pelaporan kepada masyarakat, serta keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban. Penelitian ini menegaskan bahwa aspek transparansi dan akuntabilitas masih menjadi tantangan utama dalam implementasi Dana BOS.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Nurhayati, Lesmana, dan Daros (2023) dengan judul *Evaluasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 40 Kota Bandung*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Dana BOS telah berjalan cukup baik dalam mendukung operasional sekolah, namun masih terdapat kendala pada proses distribusi dana dan kualitas pengelolaan oleh pihak sekolah. Penelitian ini

menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas pengelola BOS dalam mendukung efektivitas implementasi kebijakan.

Selanjutnya, Arif, Wicaksana, Mariam, dan Nefianto (2024) melalui penelitian berjudul *Evaluasi Kebijakan Dana BOS di Lingkungan Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat* menggunakan model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*) yang dikembangkan oleh Stufflebeam dan Shinkfield. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Dana BOS di wilayah tersebut telah berjalan secara efektif dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan mutu pendidikan. Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan BOS sangat dipengaruhi oleh dukungan kelembagaan dan kapasitas manajemen yang memadai.

Penelitian lain dilakukan oleh Simanjuntak, Suriansyah, dan Purwanti (2025) dengan judul *Efektivitas Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Meningkatkan Kinerja Sekolah*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teori efektivitas kebijakan Mazmanian dan Sabatier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas implementasi Dana BOS masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan kapasitas manajerial, lemahnya pemahaman terhadap petunjuk teknis, kurangnya pelatihan dan monitoring, serta rendahnya partisipasi komite sekolah dalam proses pengawasan.

Sementara itu, penelitian Sa'adah (2025) yang berjudul *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada UPT SMP Negeri 31 Gresik* menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis data Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antar pemangku kepentingan belum berjalan optimal karena perencanaan BOS belum melibatkan wali murid dan komite sekolah secara maksimal. Namun demikian, aspek sumber daya dan struktur birokrasi telah berjalan cukup baik melalui keberadaan Tim BOS sekolah.

Berdasarkan berbagai penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi Dana BOS pada umumnya masih menghadapi berbagai tantangan berupa keterbatasan kapasitas administrasi, lemahnya pengawasan, rendahnya partisipasi masyarakat, serta belum optimalnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana. Di sisi lain, sebagian besar penelitian terdahulu dilakukan pada daerah yang memiliki kapasitas kelembagaan relatif baik seperti Kota Malang, Bandung, Jakarta Barat, dan Gresik. Oleh karena itu, masih diperlukan penelitian yang mengkaji implementasi Dana BOS pada daerah dengan karakteristik sosial-ekonomi dan geografis yang berbeda, khususnya daerah perdesaan dengan tingkat kemiskinan relatif tinggi dan kapasitas kelembagaan yang terbatas seperti Kabupaten Lebak.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki unsur kebaruan ilmiah (*scientific novelty*) yang membedakannya dari penelitian-penelitian sebelumnya, baik dari aspek teoritis, empiris, maupun karakteristik objek penelitian. Dari aspek **objek penelitian**, penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada tingkat pendidikan dasar di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang sebagian besar dilakukan pada wilayah perkotaan atau daerah dengan kapasitas fiskal dan kelembagaan yang relatif baik, penelitian ini mengambil lokus pada daerah yang memiliki karakteristik rural, tingkat kemiskinan yang relatif tinggi, kondisi geografis yang menantang, serta kualitas pendidikan yang masih tertinggal dibandingkan daerah lain di Provinsi Banten. Karakteristik tersebut menjadikan Kabupaten Lebak sebagai lokasi yang relevan untuk memahami dinamika implementasi kebijakan pendidikan dalam konteks daerah dengan keterbatasan sumber daya dan kapasitas kelembagaan.

Dari aspek teoritis, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Knill dan Tosun (2020) yang mencakup enam dimensi utama, yaitu *policy instrument choice* (pilihan instrumen kebijakan), *policy design* (desain kebijakan), *control structure* (struktur pengawasan), *institutional design* (desain kelembagaan), *administrative capacity* (kapasitas administrasi), dan *social acceptance* (penerimaan sosial). Penggunaan teori ini merupakan kebaruan dibandingkan penelitian sebelumnya yang umumnya menggunakan teori implementasi Grindle, model evaluasi Dunn, model CIPP, maupun pendekatan Miles dan Huberman. Teori Knill dan Tosun memberikan perspektif yang lebih komprehensif karena mampu menjelaskan hubungan antara desain kebijakan, kapasitas kelembagaan, sistem pengawasan, dan dukungan sosial dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik.

Dari aspek substansi kebijakan, penelitian ini tidak hanya menelaah kepatuhan administratif dalam pengelolaan Dana BOS, tetapi juga menganalisis bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan dalam konteks daerah yang memiliki tantangan sosial, ekonomi, dan geografis yang kompleks. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi Dana BOS pada daerah dengan karakteristik rural dan kapasitas kelembagaan yang terbatas.

Secara keseluruhan, kebaruan penelitian ini terletak pada kombinasi antara penggunaan teori implementasi kebijakan Knill dan Tosun (2020), pemilihan lokus penelitian Kabupaten Lebak sebagai daerah rural yang relatif belum banyak dikaji, serta fokus analisis pada implementasi Dana BOS tingkat pendidikan dasar dalam konteks tata kelola pendidikan daerah.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tingkat pendidikan dasar di Kabupaten Lebak Provinsi Banten berdasarkan perspektif implementasi kebijakan Knill dan Tosun (2020), termasuk faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya serta upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan tersebut.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam implementasi kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tingkat pendidikan dasar di Kabupaten Lebak, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai fenomena yang diteliti berdasarkan kondisi empiris di lapangan (Grover, 2015). Penelitian ini berlandaskan paradigma post-positivisme, yang memandang bahwa realitas sosial dapat dipahami melalui interpretasi terhadap fakta-fakta yang ditemukan dalam konteks penelitian (Phillips & Burbules, 2000).

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, dengan fokus pengumpulan data pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dan satuan pendidikan penerima Dana BOS tingkat pendidikan dasar. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada karakteristik Kabupaten Lebak yang memiliki tantangan geografis, sosial, dan ekonomi yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan pendidikan.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan yang terlibat dalam implementasi kebijakan

Dana BOS, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, laporan pengelolaan Dana BOS, serta berbagai literatur yang relevan dengan penelitian (Creswell & Creswell, 2018; Sugiyono, 2018). Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling untuk memperoleh data yang mendalam dan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali informasi mengenai pelaksanaan kebijakan, faktor pendukung dan penghambat implementasi, serta upaya yang dilakukan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan Dana BOS. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan memverifikasi data yang diperoleh dari hasil wawancara (Sugiyono, 2018).

Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik, yaitu dengan membandingkan informasi dari berbagai informan serta mencocokkannya dengan dokumen pendukung yang relevan. Teknik ini digunakan untuk meningkatkan kredibilitas dan validitas hasil penelitian.

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (1992) yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Melalui tahapan tersebut, data yang diperoleh dianalisis secara sistematis sehingga menghasilkan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tingkat pendidikan dasar di Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai implementasi kebijakan Dana BOS serta berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilannya dalam mendukung pengelolaan pendidikan yang efektif, transparan, dan akuntabel di Kabupaten Lebak.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tingkat pendidikan dasar di Kabupaten Lebak telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat melalui berbagai regulasi dan petunjuk teknis yang berlaku. Pemanfaatan sistem digital seperti ARKAS dan SIPLah turut mendukung proses perencanaan, penggunaan, dan pelaporan Dana BOS secara lebih terstruktur. Namun demikian, implementasi kebijakan belum sepenuhnya optimal karena masih ditemukan berbagai kendala, terutama pada aspek kapasitas administrasi sekolah, keterlambatan pelaporan, kompleksitas pengelolaan keuangan, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan Dana BOS. Berdasarkan perspektif implementasi kebijakan Knill dan Tosun (2020), efektivitas pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh enam dimensi utama, yaitu pilihan instrumen kebijakan, desain kebijakan, struktur pengawasan, desain kelembagaan, kapasitas administrasi, dan penerimaan sosial.

Tabel 3.1
Ringkasan Hasil Implementasi Kebijakan Dana BOS Berdasarkan Dimensi Knill dan Tosun (2020)

Dimensi	Hasil Penelitian
Policy Instrument Choice	Berjalan baik, instrumen kebijakan dinilai sesuai dengan kebutuhan sekolah.
Policy Design	Cukup baik, namun masih terdapat kendala administratif yang memengaruhi pencairan dana.
Control Structure	Pengawasan formal berjalan baik, pengawasan masyarakat belum optimal.
Institutional Design	Pembagian tugas dan koordinasi kelembagaan telah berjalan cukup efektif.
Administrative Capacity	Masih menjadi kendala utama karena keterbatasan SDM dan beban administrasi sekolah.
Social Acceptance	Tingkat penerimaan masyarakat tinggi, tetapi partisipasi pengawasan masih rendah.

Sumber: Diolah dari hasil penelitian, 2026.

3.1. Pilihan Instrumen Kebijakan (Policy Instrument Choice)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa instrumen kebijakan yang digunakan dalam implementasi Dana BOS telah mendukung pencapaian tujuan program. Keberadaan regulasi yang jelas, petunjuk teknis yang diperbarui secara berkala, serta penggunaan aplikasi ARKAS dan SIPLah memberikan pedoman yang relatif mudah dipahami oleh pelaksana kebijakan di tingkat sekolah. Instrumen tersebut juga membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana.

Meskipun demikian, beberapa informan menyampaikan bahwa perubahan petunjuk teknis yang cukup sering menuntut sekolah untuk terus melakukan penyesuaian administrasi. Selain itu, masih terdapat sekolah yang mengalami kesulitan dalam mengoperasikan aplikasi pengelolaan keuangan karena keterbatasan kemampuan teknis operator maupun bendahara sekolah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa instrumen kebijakan telah tepat, tetapi efektivitas penggunaannya masih dipengaruhi oleh kapasitas pelaksana di lapangan.

3.2. Desain Kebijakan (*Policy Design*)

Berdasarkan hasil penelitian, desain kebijakan Dana BOS telah mengatur secara jelas tujuan, sasaran, mekanisme penyaluran, penggunaan, serta pertanggungjawaban dana. Kejelasan desain kebijakan memudahkan sekolah dalam menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran sesuai kebutuhan operasional pendidikan.

Namun demikian, dalam implementasinya masih ditemukan beberapa hambatan administratif yang menyebabkan keterlambatan pencairan dana. Beberapa sekolah mengalami kendala dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban maupun penginputan data pada sistem yang menjadi prasyarat pencairan tahap berikutnya. Temuan ini menunjukkan bahwa desain kebijakan secara normatif telah memadai, tetapi masih memerlukan penyederhanaan prosedur administratif agar lebih mudah diterapkan oleh seluruh sekolah.

3.3. Struktur Pengawasan (*Control Structure*)

Struktur pengawasan dalam implementasi Dana BOS di Kabupaten Lebak melibatkan berbagai pihak, mulai dari Dinas Pendidikan, Inspektorat Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, hingga masyarakat melalui komite sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme

pengawasan formal telah berjalan cukup baik melalui kegiatan monitoring, evaluasi, pembinaan, dan audit secara berkala. Pengawasan yang efektif merupakan bagian penting dari prinsip akuntabilitas dan etika pemerintahan untuk memastikan penggunaan sumber daya publik berjalan sesuai ketentuan yang berlaku (Daraba & Faisal, 2015).

Meskipun demikian, pengawasan yang dilakukan masyarakat belum berjalan secara optimal. Keterlibatan komite sekolah umumnya masih terbatas pada proses persetujuan dokumen perencanaan dan pelaporan, sedangkan fungsi pengawasan terhadap penggunaan dana secara substantif belum dilakukan secara maksimal. Kondisi ini menyebabkan pengawasan implementasi Dana BOS masih lebih didominasi oleh mekanisme birokratis dibandingkan pengawasan partisipatif.

3.4 Desain Kelembagaan (*Institutional Design*)

Implementasi Dana BOS melibatkan berbagai organisasi yang memiliki tugas dan kewenangan berbeda, mulai dari pemerintah pusat hingga satuan pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian peran antar lembaga telah diatur secara jelas dan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kelembagaan yang memiliki pembagian tugas yang jelas akan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pemerintah (Khairi, 2021).

Koordinasi antarorganisasi dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, pembinaan teknis, monitoring, dan evaluasi. Hubungan antara Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dengan sekolah penerima Dana BOS secara umum berjalan baik. Namun demikian, masih ditemukan beberapa kendala komunikasi dan administrasi yang menyebabkan keterlambatan penyampaian informasi maupun proses pencairan dana. Oleh karena itu, penguatan koordinasi dan komunikasi kelembagaan masih diperlukan untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya tata kelola pemerintahan daerah yang mampu mengintegrasikan berbagai aktor dan sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan publik (Hamid, 2020).

3.5 Kapasitas Administrasi (*Administrative Capacity*)

Kapasitas administrasi merupakan dimensi yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi Dana BOS di Kabupaten Lebak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan administrasi pada tingkat Dinas Pendidikan relatif memadai, baik dari aspek sumber daya manusia maupun dukungan sistem kerja.

Sebaliknya, pada tingkat sekolah masih ditemukan berbagai keterbatasan, terutama terkait jumlah dan kompetensi sumber daya manusia yang mengelola Dana BOS. Di beberapa sekolah, tugas bendahara BOS masih dirangkap oleh guru sehingga menambah beban kerja administratif. Selain itu, kemampuan pengelolaan aplikasi digital dan penyusunan laporan keuangan belum merata pada seluruh sekolah. Kondisi ini berdampak pada keterlambatan pelaporan dan berpotensi menghambat proses pencairan dana. Kapasitas aparatur menjadi faktor penting dalam menentukan kualitas pelaksanaan program pemerintah karena keberhasilan kebijakan sangat dipengaruhi oleh kemampuan pelaksana dalam menjalankan fungsi administrasi secara efektif (Nurdin, 2019).

3.6 Penerimaan Sosial (*Social Acceptance*)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Dana BOS memperoleh tingkat penerimaan yang tinggi dari masyarakat. Program ini dinilai mampu membantu operasional sekolah sekaligus mengurangi beban biaya pendidikan yang harus ditanggung oleh orang tua peserta didik. Penerimaan positif tersebut menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

Meskipun demikian, penerimaan yang tinggi belum diikuti oleh tingkat partisipasi masyarakat yang memadai dalam proses pengawasan dan evaluasi penggunaan dana. Sebagian besar masyarakat masih memandang pengelolaan Dana BOS sebagai urusan internal sekolah sehingga keterlibatan dalam proses pengawasan relatif rendah. Oleh karena itu, peningkatan transparansi dan partisipasi masyarakat menjadi aspek penting yang perlu diperkuat dalam implementasi kebijakan Dana BOS ke depan.

Tabel 3.2
Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Dana BOS di Kabupaten Lebak

Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
Regulasi dan petunjuk teknis yang jelas	Keterbatasan SDM pengelola BOS di sekolah
Dukungan sistem digital ARKAS dan SIPLah	Kompleksitas administrasi dan pelaporan
Komitmen pemerintah daerah dan sekolah	Keterlambatan pelaporan dan pencairan dana
Tingginya penerimaan masyarakat terhadap program BOS	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan
Mekanisme pembinaan dan pengawasan yang tersedia	Perbedaan kemampuan administrasi antar sekolah

Sumber: Diolah dari hasil penelitian, 2026.

Berdasarkan seluruh dimensi yang dianalisis, implementasi Kebijakan Dana BOS tingkat pendidikan dasar di Kabupaten Lebak dapat dikategorikan cukup efektif namun belum optimal. Keberhasilan implementasi terutama didukung oleh instrumen kebijakan yang jelas, desain kelembagaan yang relatif baik, dan tingginya penerimaan masyarakat terhadap program. Namun demikian, keterbatasan kapasitas administrasi sekolah serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan masih menjadi tantangan utama yang perlu mendapat perhatian guna meningkatkan efektivitas pengelolaan Dana BOS di masa mendatang.

3.7. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Dana BOS tingkat pendidikan dasar di Kabupaten Lebak telah berjalan cukup baik, namun belum sepenuhnya optimal. Berdasarkan perspektif Knill dan Tosun (2020), keberhasilan implementasi didukung oleh instrumen kebijakan yang jelas, desain kebijakan yang terstruktur, serta pembagian peran kelembagaan yang telah berjalan sesuai ketentuan. Pemanfaatan ARKAS dan SIPLah juga membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana BOS.

Meskipun demikian, penelitian menemukan bahwa kapasitas administrasi menjadi faktor yang paling menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Keterbatasan kompetensi pengelola BOS, beban administrasi yang tinggi, serta kemampuan yang belum merata dalam pengoperasian sistem digital masih menjadi hambatan utama. Temuan ini sejalan dengan penelitian Simanjuntak, Suriansyah, dan Purwanti (2025) yang menyatakan bahwa efektivitas Dana BOS sangat dipengaruhi oleh kapasitas manajerial dan administrasi pelaksana kebijakan.

Selain itu, pengawasan formal yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Inspektorat telah berjalan cukup baik, tetapi partisipasi masyarakat dalam pengawasan masih relatif rendah.

Temuan ini memperkuat hasil penelitian Sa'adah (2025) yang menunjukkan bahwa keterlibatan komite sekolah dan wali murid dalam pengelolaan Dana BOS masih bersifat administratif dan belum optimal dalam fungsi pengawasan. Dengan demikian, peningkatan kapasitas administrasi dan penguatan partisipasi masyarakat menjadi aspek penting dalam meningkatkan efektivitas implementasi Dana BOS di Kabupaten Lebak.

3.8. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Salah satu temuan menarik dalam penelitian ini adalah bahwa digitalisasi pengelolaan Dana BOS melalui ARKAS dan SIPLah belum secara otomatis menyelesaikan permasalahan tata kelola. Meskipun sistem digital mampu meningkatkan transparansi dan kemudahan pelaporan, efektivitasnya tetap bergantung pada kemampuan sumber daya manusia yang mengoperasikannya. Temuan ini menunjukkan bahwa transformasi digital perlu diimbangi dengan peningkatan kompetensi pelaksana kebijakan.

Penelitian ini juga menemukan adanya perbedaan tingkat keberhasilan implementasi antar sekolah yang dipengaruhi oleh kapasitas internal organisasi, terutama kompetensi kepala sekolah dan bendahara BOS. Sekolah yang memiliki kemampuan administrasi lebih baik cenderung mampu mengelola Dana BOS secara lebih efektif.

Temuan menarik lainnya adalah tingginya tingkat penerimaan masyarakat terhadap kebijakan Dana BOS yang tidak selalu diikuti oleh tingginya partisipasi dalam pengawasan. Masyarakat umumnya merasakan manfaat program BOS dalam membantu pembiayaan pendidikan, tetapi masih menyerahkan pengawasan penggunaan dana kepada pihak sekolah. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerimaan terhadap kebijakan belum tentu berbanding lurus dengan keterlibatan masyarakat dalam proses implementasi kebijakan (Knill & Tosun, 2020).

Secara keseluruhan, temuan penelitian menegaskan bahwa keberhasilan implementasi Dana BOS tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi, tetapi juga oleh kapasitas sumber daya manusia, kesiapan organisasi pelaksana, dan partisipasi masyarakat dalam mendukung tata kelola pendidikan yang efektif dan akuntabel.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tingkat pendidikan dasar di Kabupaten Lebak Provinsi Banten secara umum telah berjalan cukup baik dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Ditinjau dari perspektif implementasi kebijakan Knill dan Tosun (2020), dimensi *policy instrument choice*, *policy design*, dan *institutional design* menunjukkan capaian yang relatif baik karena didukung oleh regulasi yang jelas, penggunaan sistem digital melalui ARKAS dan SIPLah, serta pembagian tugas dan kewenangan yang telah terstruktur. Selain itu, kebijakan Dana BOS juga memperoleh tingkat penerimaan yang baik dari masyarakat karena mampu mendukung operasional sekolah dan membantu mengurangi beban biaya pendidikan yang ditanggung oleh orang tua peserta didik.

Meskipun demikian, implementasi kebijakan belum sepenuhnya optimal karena masih menghadapi berbagai kendala, terutama pada dimensi *administrative capacity* dan *social acceptance*. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di tingkat sekolah, tingginya beban administrasi, serta kemampuan yang belum merata dalam pengelolaan sistem digital masih menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan. Di sisi lain, partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan Dana BOS juga belum berjalan secara optimal meskipun tingkat penerimaan terhadap program cukup tinggi. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi

pengelola BOS, penguatan pembinaan dan pendampingan teknis, serta peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan menjadi faktor penting untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas implementasi Dana BOS di Kabupaten Lebak.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup kajian yang hanya berfokus pada implementasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tingkat pendidikan dasar di Kabupaten Lebak dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian juga lebih menitikberatkan pada perspektif pelaksana kebijakan dan belum melakukan pengukuran kuantitatif terhadap tingkat efektivitas maupun dampak Dana BOS terhadap capaian mutu pendidikan. Selain itu, keterbatasan waktu penelitian menyebabkan pengumpulan data belum dapat menjangkau seluruh sekolah penerima Dana BOS yang tersebar di wilayah Kabupaten Lebak.

Arah Masa Depan Penelitian *(future work)*: Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian implementasi Dana BOS dengan menggunakan pendekatan campuran (*mixed methods*) atau pendekatan kuantitatif sehingga dapat mengukur secara lebih objektif pengaruh pengelolaan Dana BOS terhadap peningkatan mutu pendidikan. Selain itu, penelitian dapat dilakukan pada wilayah yang memiliki karakteristik berbeda untuk memperoleh perbandingan implementasi kebijakan antar daerah, serta mengkaji lebih lanjut peran digitalisasi, kapasitas kelembagaan, dan partisipasi masyarakat dalam mendukung efektivitas tata kelola Dana BOS secara berkelanjutan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, seluruh informan penelitian, serta semua pihak yang telah memberikan dukungan, data, dan masukan selama proses penelitian. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu administrasi publik dan peningkatan tata kelola pendidikan.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Arifin, M., & Mulyani, D. (2022). Governance and effectiveness of school operational assistance policy in Indonesia. Cogent Education, 9(1), 203–219. https://doi.org/10.15575/kh.v8i1.52173.

Farida, N., & Mulyaningtyas. (2024). Implementation of Accounting Information Systems And Accountability for BOS Regular Funds at SMP Plus Hidayatul Mubtadiin Singosari. Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA), https://journal.stieken.ac.id/index.php/peta/article/view/748/.

Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. Administration & Society, 6(4), 445–488. https://doi.org/10.1177/009539977500600404.

Doringin, S., Silaban, S., Theodorus, P., & Karla, S. (2023). The Impact of School Operational Assistance Funds on Students' Performance in Jakarta https://doi.org/10.47577/tssj.v49i1.9823.

Rahman, A.A., (2019). Decentralised Education Policy in Indonesia 14(3), 365–380. https://doi.org/10.31273/eirj.v6i2.240.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. https://doi.org/10.1002/nha3.20258.

Knill, C., & Tosun, J. (2020). Public policy: A new introduction (2nd ed.). Macmillan International Higher Education.

Phillips, D. C., & Burbules, N. C. (2000). Postpositivism and educational research. Lanham, MD: Rowman & Littlefield Publishers.

Khairi, H. (2021). *Organisasi Sektor Publik*. Yogyakarta: PT Nasya Expanding Management. https://books.google.co.id/books?id=oaVOEAAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false.

Daraba, D., & Faisal, M. (2015). *Etika pemerintahan*. IPDN Press.

Faisal, M., & Daraba, D. (2020). *Modal sosial dan efektivitas pemerintahan*. IPDN Press.

Hamid, H. (2020). *Manajemen pemerintahan daerah*. Garis Khatulistiwa. https://www.researchgate.net/publication/367125627_Manajemen_Pemerintahan_Daerah.

Nurdin, I. (2019). *Kualitas pelayanan publik (Perilaku aparatur dan komunikasi birokrasi dalam pelayanan publik)*. Media Sahabat Cendekia. http://eprints.ipdn.ac.id/4509/2/BUKU%20KUALITAS%20PELAYANAN%20PUBLIK.pdf.

Sugiyono. (2018). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Widodo, A. P., Purnamasari, A. I., Hidayah, Y. I., & Hasanah, Z. N. (2020). Implementasi Kebijakan Dana BOS di Kota Malang. https://jurnal.uny.ac.id/index.php/sosia/article/view/32478

Nurhayati, S., Lesmana, D., & Daros. (2023). Evaluasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 40 Kota Bandung. https://doi.org/10.54371/jiip.v6i8.2587

Arif, Z., Wicaksana, H. H., Mariam, S., & Nefianto, T. (2024). Evaluasi Kebijakan Dana BOS di Lingkungan Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat. https://doi.org/10.31334/transparansi.v7i1.3624

Simanjuntak, S., Suriansyah, A., & Purwanti. (2025). Efektivitas Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Meningkatkan Kinerja Sekolah. https://doi.org/10.34125/jmp.v10i2.668

Sa'adah, A. (2025). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada UPT SMP Negeri 31 Gresik. https://doi.org/10.30587/didaktika.v31i1.9045